

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN
INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI
NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN
ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI
Hari, Tanggal : Kamis, 27 Januari 2011
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Pembukaan
2. Penjelasan oleh Menhan dan Panglima TNI
a. Evaluasi Program kerja Kemenhan/TNI 2010
b. Penyerapan Anggaran TA 2010
c. Program Kerja Kemenhan/TNI TA 2011
d. Tindak lanjut atas laporan BPK Semester I T.A. 2010
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : ... orang dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro
- Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari kamis, tanggal 27 Februari 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dapat menerima pemaparan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI terkait dengan evaluasi kinerja Kemhan/TNI tahun 2010 dan rencana kerja Kemhan/TNI tahun 2011. Berkaitan dengan evaluasi kinerja Kemhan/TNI tahun 2010, Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas penyerapan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2010 mencapai 99,7%. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mendukung upaya Kemhan/TNI dalam pencapaian opini laporan Hasil

Pemeriksaan BPK terhadap realisasi keuangan Kemhan/TNI T.A. 2011 dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi catatan evaluasi Kemhan di bidang pengawasan, yaitu:

- a. Penerapan manajemen di Satker-satker masih belum berjalan optimal mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, serta laporan.
 - b. Dalam keterbatasan alokasi anggaran masih ditemukan adanya perumusan kegiatan dan kebutuhan belanja yang tidak memenuhi asas perencanaan dan berdasarkan atas urgensi, serta prioritas pekerjaan sehingga terjadi pergeseran kegiatan.
 - c. Pergeseran anggaran dukungan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berakibat menyulitkan dalam penyusunan laporan keuangan.
 - d. Proses pengadaan barang/jasa umum (Alsatri, Alkaptor, dan peralatan lainnya) pada umumnya belum tertib dan perencanaannya tidak didukung data yang memadai.
 - e. Sistem Pengendalian Internal (Spl) sesuai dengan PP Nomor 60 belum dapat diwujudkan di lingkungan satker, sedangkan pelaksanaan pengawasan oleh auditor hanya sebatas “post audit”. Kedepan, diharapkan adanya kesadaran para satker untuk mewujudkan SPI di lingkungannya dengan konsisten.
2. Berkaitan dengan kebijakan penerapan tunjangan kinerja, Komisi I DPR RI minta Kementerian Pertahanan untuk dapat melaksanakan kebijakan tunjangan kinerja secara konsisten dan menyeluruh. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Keuangan) untuk mendorong sinkronisasi kebijakan tunjangan kinerja bagi prajurit yang ditugaskan di luar struktur organisasi Kemhan dan TNI.
 3. Terkait dengan konsistensi pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan dengan pelaksanaan Politik Luar Negeri RI, Bebas-Aktif, Komisi I DPR RI minta pemerintah agar dalam pemanfaatan dan penggunaan produk-produk industri strategis nasional untuk pertahanan selaras dengan Politik Luar Negeri RI.
 4. Dalam hal rencana hibah produk Alutsista dari negara lain untuk digunakan oleh TNI, Komisi I DPR RI minta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam, serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar di masa depan hal tersebut tidak menimbulkan ketergantungan RI dengan negara penghibah tersebut. (khususnya hibah F16)

5. Dalam rangka mencapai visi prajurit TNI yang profesional dalam konteks pembangunan kekuatan pertahanan yang berorientasi pada MEF, Komisi I DPR RI minta Kementerian Pertahanan untuk memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan yang memadai, pemenuhan bekal pokok sesuai dengan standar, dan penyediaan berbagai perlengkapan untuk menunjang tugas kerja, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan.
6. Terkait dengan penjagaan integritas wilayah NKRI yang diantaranya meliputi wilayah perairan, wilayah terdepan, dan pulau-pulau terdepan, Komisi I DPR RI minta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
7. Dalam rangka pengerahan prajurit TNI untuk penjagaan terhadap pulau-pulau terdepan dan penjagaan wilayah-wilayah yang rawan konflik, Komisi I DPR RI minta Panglima TNI untuk melakukan rotasi yang teratur dengan jangka waktu yang ideal bagi prajurit TNI yang ditugaskan.
8. Seiring dengan berbagai pencapaian Reformasi di tubuh TNI, Komisi I DPR RI minta Panglima TNI untuk terus mengupayakan pembinaan yang tepat dan menyeluruh di jajaran TNI dalam mendukung pelaksanaan OMSP.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB

Jakarta, 27 Februari 2011

KETUA RAPAT,

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.
A-73